

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU YUDI WIJAYANTI
2. Jabatan : WAKIL KEPALA BIRO SDM
3. NHK : 629347

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.448.506.986**

1. Bangunan Seluas 41 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , LAINNYA
Rp. 1.191.986
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, LAINNYA
Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/70 m2 di TANGERANG,
HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/110 m2 di KOTA DEPOK ,
LAINNYA Rp. 915.000.000
5. Tanah Seluas 285 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp.
752.400.000
6. Bangunan Seluas 29 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , LAINNYA
Rp. 292.915.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di BOGOR, LAINNYA
Rp. 90.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/80 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di TANGERANG,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 992.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **320.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.



90.000.000

3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **72.000.000****D. SURAT BERTARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.529.616.417****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **6.370.123.403****III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **6.370.123.403**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.